

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*.  
Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*.  
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edwards III, George C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington:  
Congressional Quarterly Press
- Fischer, Frank., Gerald J. Miller., Mara S.Sidney. 2014. *Handbook Analisis  
Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*. Bandung: Nusa Media
- Pasolong, Harbani. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung:  
Alfabeta
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.  
Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus*.  
Yogyakarta: Media Pressindo
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan Penelitian  
Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group

### Artikel Jurnal

- Khairunnisa, Andi Akhirah. 2018. 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi  
Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah',

*Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5.7, 65–78

Laia, Otanius., Odaligoziduhu Halawa, dan Palindungan Lahagu. 2022.

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Publik.

*Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1.1, 70–76. Diakses dari

<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.15>

Mahadi, Ujang, ‘Komunikasi Pendidikan. 2021. Urgensi Komunikasi Efektif

Dalam Proses Pembelajaran, *JOPPAS: Journal of Public Policy and*

*Administration Silampari*, 2.2, 80–90

Titania, Madeleine Yeza; Harsanto Nursadi. 2023. Kualitas Dan Kepatuhan

Pelayanan Publik Oleh Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *JISIP (Jurnal*

*Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.1, 281–93.

<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4160>

## Skripsi

Ilham, Riki. 2018. Pelayanan Terhadap Pengaduan Masyarakat di Kantor

Wilayah KEMENTERIAN Hukum Dan HAM SUMBAR Sebagai Bentuk

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). Skripsi. Universitas

Andalas.

Maheswara, Mahyuda Dwi. 2022. Implementasi Pelayanan Publik Berbasis

HAM Di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo. Skripsi.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <<http://eprints.umpo.ac.id/9306/>>

Siregar, Iqbal Rawi. 2023. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis

Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Skripsi.  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.  
<<http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1264/>>

Susandra, Mayang Ratu. 2024. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Implementasi Penilaian Kepatuhan di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Andalas.

### **Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.HA.03.07 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HA.02.01.01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Nomor: W3-01 HA.03.01 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Operator Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Tahun 2024

Laporan data dukung P2HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar tahun 2023

Laporan Diseminasi P2HAM Bukittinggi tahun 2024

Laporan Diseminasi P2HAM Solok tahun 2024

### Website Internet

Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM. 2022. Peluncuran Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

[https://www.youtube.com/live/7tYWWtmS\\_yQ?si=vupbrVFRfjLJbZp](https://www.youtube.com/live/7tYWWtmS_yQ?si=vupbrVFRfjLJbZp)

Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM. 2023. #KasihPaHAM PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM <https://www.youtube.com/watch?v=QKvXgN2IeS0&t=4s>

Kanwil Kemenkumham NTT. <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9194-seluruh-unit-kerja-kemenkumham-diajak-berjuang-bersama-realisasikan-pelayanan-publik-berbasis-ham>